



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 12 Agustus 2026

Halaman: 5

» WARGA MISKIN

## DPRD Jogja Dorong Desil Bansos Diperluas

JOGJA—Sejumlah warga tidak mampu di Kota Jogja masih belum tersentuh bantuan sosial pemerintah daerah karena tercatat dalam desil 6 hingga 10. DPRD Kota Jogja mendorong pelebaran cakupan desil penerima bantuan agar warga yang secara kondisi ekonomi layak dibantu tidak terlewat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Darini, mengatakan masih ditemukan warga yang kondisi ekonominya layak menerima bantuan, tetapi tercatat dalam desil 6 hingga 10. Padahal, sejumlah program bantuan pemerintah memiliki batasan sasaran berdasarkan desil.

Saat ini, sasaran Kartu Situasi Jaminan Sosial (KSJS) dan Santunan Kematian (Sankem) difokuskan pada desil 1 hingga 2. Sementara program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) menasar warga desil 1 hingga 5.

"Kami di Komisi D melihat masih ada masyarakat yang harusnya menerima bantuan, tetapi desilnya tercantum di atas desil 5, yaitu desil 6 ke atas. Padahal setelah kita lihat langsung di lapangan, mereka betul-betul warga tidak mampu," ujar Darini, Selasa (11/8).

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga data kesejahteraan yang diperbarui secara berkala belum tentu selalu mencerminkan kondisi terkini warga.

Karena itu, Darini mendorong Pemkot Jogja mencari ruang kebijakan yang tetap sesuai regulasi untuk memperluas cakupan penerima bantuan.

"Basil kegiatan awal, kami mendorong adanya pelebaran desil. Untuk JPD, intervensi kita mendorong bisa diperluas sampai ke desil 6," katanya.

Meski cakupan penerima diperluas, bantuan tidak akan diberikan tanpa proses verifikasi. DPRD mendorong pengetatan administrasi bagi warga yang masuk dalam desil 6.

"Warga nantinya diwajibkan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Mampu bermaterai yang dibuat secara mandiri. Dalam surat tersebut juga dicantumkan klausul kesediaan mengembalikan bantuan apabila informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai kondisi sebenarnya," katanya.

Mekanisme tersebut disiapkan karena pihak kelurahan kini tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Sementara untuk program Sankem, Darini mendorong agar penerima tidak hanya dibatasi pada desil 1 dan 2. Dia mengunduk penerapan bantuan berjenjang dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

"Jangkauan penerima Sankem kita minta diperluas, tetapi besarnya disesuaikan dengan desil. Misalnya desil 1-2 menerima penuh Rp4 juta, nanti desil atasnya disesuaikan, seperti Rp1 juta atau Rp2 juta. Yang penting ada perhatian dan kehadiran Pemkot," ujarnya.

Darini menilai skema tersebut dapat menjadi jalan tengah agar warga yang berada di luar batas desil penerima utama tetap mendapatkan intervensi pemerintah, tanpa mengabaikan keterbatasan fiskal daerah.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, dia meminta Pemkot Jogja segera menyesuaikan regulasi teknis. Penyesuaian Peraturan Wali Kota (Perwal) dinilai diperlukan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di lapangan. (Stefani Yudianto)

| Instansi                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat DPRD Kota | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 04 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005